



Supporting and Inhibiting Factors in the Implementation of the Kesatria Team in Maintaining Public Order in North Padang District, Padang City

Melani Fitria Devita Sari ¹, Zikri Alhadi ²

* melanifitriadevita@gmail.com

¹ Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

ABSTRACT

Public order constitutes one of the compulsory functions of local governments and requires policies to be implemented in an effective and sustainable manner. The Padang Utara District in Padang City continues to experience persistent public order issues, including the presence of unauthorized street vendors, improper parking practices, and the inappropriate use of public spaces. In response to these challenges, the district government introduced a non-digital policy initiative through the establishment of the Kesatria Team. This study aims to analyze the factors that support and hinder the implementation of the Kesatria Team in maintaining public order in Padang Utara District. The research adopts a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews and document review. The findings reveal that inter-agency coordination, strong leadership commitment, and clearly defined task allocation serve as key supporting factors in policy implementation. Conversely, low levels of public awareness, economic pressures, and limited supporting facilities remain the primary obstacles to effective policy execution.

Keywords: Performance, Public Order, Policy Innovation, Kesatria Team

PENDAHULUAN

Ketenteraman dan ketertiban umum menjadi salah satu kewajiban paling mendasar bagi pemerintah daerah, yang bertugas menjaga stabilitas sosial sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh lapisan masyarakat. Di wilayah perkotaan yang ditandai dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi serta aktivitas ekonomi yang sangat dinamis, permasalahan ketertiban umum cenderung muncul secara sering dan memiliki karakter yang kompleks serta sulit diatasi. Kecamatan Padang Utara, yang merupakan salah satu kawasan strategis di Kota Padang, tidak luput dari tantangan serupa, di mana sering terjadi fenomena seperti keberadaan PKL liar yang mengganggu, praktik parkir yang tidak teratur, serta pemanfaatan ruang publik yang bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Beragam hasil penelitian sebelumnya secara konsisten menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan ketertiban umum tidak semata-mata ditentukan oleh adanya regulasi formal, melainkan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pelaksanaan di tingkat lapangan. Kajian-kajian implementasi kebijakan publik secara khusus menyoroti bahwa ketersediaan sumber daya yang memadai, koordinasi yang erat antarinstansi terkait, serta tingkat partisipasi aktif dari masyarakat menjadi elemen-elemen kunci yang menentukan efektivitas suatu kebijakan. Di sisi lain, sejumlah studi juga mengungkapkan adanya hambatan signifikan seperti tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap aturan yang berlaku, serta tekanan ekonomi yang berat bagi kelompok-kelompok yang paling terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.

Meskipun terdapat banyak penelitian di bidang ini, namun studi yang secara spesifik membahas faktor pendukung dan penghambat dari inovasi kebijakan non-digital di tingkat kecamatan masih tergolong sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih cenderung berfokus pada level pemerintahan kota secara keseluruhan atau pada kebijakan sektoral tertentu saja. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak akan penelitian yang lebih rinci dan kontekstual untuk memahami secara mendalam dinamika pelaksanaan kebijakan ketertiban umum justru di tingkat kecamatan yang menjadi ujung tombak pelayanan publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini secara eksplisit bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Tim Kesatria guna menjaga ketertiban umum di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai elemen-elemen yang benar-benar memengaruhi efektivitas inovasi kebijakan ketertiban umum pada tingkat lokal yang paling dekat dengan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dirancang untuk menggambarkan dan memahami secara komprehensif faktor-faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan Tim Kesatria dalam menjaga ketertiban umum di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, berdasarkan kondisi empiris yang sesungguhnya ditemukan di lapangan. Penentuan subjek atau informan penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu dengan memilih individu-individu yang dianggap memiliki pemahaman mendalam dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan ketertiban umum tersebut. Informan yang terlibat mencakup aparatur pemerintahan Kecamatan Padang Utara, anggota-anggota Tim Kesatria, personel dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta masyarakat yang secara langsung terdampak, khususnya para pedagang kaki lima.

Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara purposive, yaitu dengan menentukan subjek penelitian yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan ketertiban umum. Informan penelitian meliputi aparatur Kecamatan Padang Utara, anggota Tim Kesatria, personel Satuan Polisi Pamong Praja, serta masyarakat yang terdampak kebijakan, khususnya pedagang kaki lima.

Teknik pengumpulan data utama terdiri dari dua pendekatan, yaitu wawancara mendalam yang bersifat semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara khusus sesuai dengan fokus penelitian, serta studi dokumentasi yang komprehensif. Studi dokumentasi ini meliputi analisis terhadap dokumen-dokumen kebijakan terkait, laporan-laporan kegiatan Tim Kesatria, data statistik mengenai pelanggaran ketertiban umum, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu tersebut. Dalam proses ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian yang didukung oleh pedoman wawancara dan bahan dokumentasi sebagai alat bantu.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data di mana data yang terkumpul diseleksi dan disederhanakan, penyajian data dalam bentuk yang lebih terstruktur, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang telah terkumpul dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang koheren untuk menghasilkan kesimpulan yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Tim Kesatria dalam upaya menjaga ketertiban umum di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, dipengaruhi oleh

komposisi berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat yang kompleks. Berdasarkan analisis mendalam terhadap data wawancara dan dokumen-dokumen terkait, faktor-faktor pendukung utama justru berasal dari aspek internal kelembagaan. Koordinasi lintas instansi yang melibatkan pihak kecamatan, Tim Kesatria itu sendiri, Satuan Polisi Pamong Praja, serta perangkat kelurahan berjalan dengan cukup baik dan efektif, sehingga memungkinkan pelaksanaan kegiatan penertiban dapat dilakukan secara terpadu dan sinergis tanpa hambatan yang berarti. Selain itu, komitmen yang tinggi dari pimpinan kecamatan disertai dengan pembagian tugas yang jelas dan terdefinisi dengan baik di dalam Tim Kesatria turut berkontribusi besar dalam memperlancar proses implementasi kebijakan ketertiban umum langsung di lapangan.

Penelitian juga menemukan bahwa dukungan dari para aparatur pelaksana yang memiliki pemahaman yang matang mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing menjadi faktor krusial dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan dari kegiatan penertiban. Pendekatan yang bersifat persuasif yang diterapkan oleh Tim Kesatria, seperti melalui kegiatan imbauan dan sosialisasi intensif kepada masyarakat, terbukti efektif dalam meminimalkan potensi konflik atau perlawanan selama proses pelaksanaan kebijakan. Temuan ini secara tegas menegaskan bahwa keberhasilan dari sebuah inovasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tindakan penegakan aturan secara tegas, tetapi juga sangat bergantung pada kemampuan para pelaksana dalam membangun komunikasi yang efektif dan harmonis dengan masyarakat yang menjadi target kebijakan.

Akan tetapi, penelitian ini juga berhasil mengidentifikasi sejumlah hambatan signifikan dalam pelaksanaan Tim Kesatria. Hambatan utama yang paling menonjol berasal dari rendahnya tingkat kesadaran sebagian besar masyarakat terhadap pentingnya menjaga ketertiban umum. Faktor ekonomi, khususnya yang dialami oleh para pedagang kaki lima, menjadi penyebab dominan dari munculnya resistensi atau penolakan terhadap berbagai kegiatan penertiban yang dilakukan. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung yang masih minim, ditambah dengan jumlah personel yang belum mencukupi kebutuhan, juga secara nyata memengaruhi tingkat optimalisasi pelaksanaan kebijakan langsung di lapangan.

Pembahasan dari temuan ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ketertiban umum melalui mekanisme Tim Kesatria merupakan sebuah proses dinamis yang dipengaruhi oleh interaksi yang erat antara faktor-faktor kelembagaan internal dengan kondisi sosial masyarakat eksternal. Walaupun Tim Kesatria telah memberikan kontribusi positif yang nyata dalam menjaga ketertiban umum, namun keberlanjutan serta efektivitas kebijakan ini masih sangat membutuhkan dukungan tambahan berupa peningkatan kesadaran masyarakat secara bertahap dan penguatan sumber daya pendukung agar tujuan akhir kebijakan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Pembahasan

Faktor Pendukung Pelaksanaan Tim Kesatria dalam Menjaga Ketertiban Umum

Pelaksanaan Tim Kesatria dalam menjaga ketertiban umum di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, didukung oleh sejumlah faktor signifikan yang berasal baik dari aspek kelembagaan maupun dari proses pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan. Salah satu faktor pendukung yang paling menonjol adalah terjalinnya koordinasi lintas instansi yang erat dan efektif antara pihak kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja, serta seluruh perangkat kelurahan yang ada di wilayah tersebut. Koordinasi yang solid ini sangat mempermudah pelaksanaan berbagai kegiatan penertiban di lapangan karena masing-masing pihak yang terlibat telah memiliki pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab spesifik yang harus dijalankan.

Selain itu, dukungan penuh serta komitmen yang konsisten dari pimpinan kecamatan

juga menjadi faktor yang sangat penting dalam menjamin keberlanjutan operasional Tim Kesatria. Para pimpinan kecamatan berperan aktif dalam memberikan arahan strategis yang jelas, melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan, serta mendorong agar semua kegiatan penertiban dapat berjalan dengan konsisten dan tidak terputus. Hal ini sejalan dengan temuan dari berbagai skripsi dan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa peran pimpinan yang aktif dan terlibat secara langsung dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja keseluruhan aparaturnya di tingkat lapangan.

Pembagian Tugas dan Pola Kerja Tim

Keberadaan pembagian tugas yang jelas dan terstruktur di dalam Tim Kesatria membuat seluruh proses pelaksanaan penertiban berjalan lebih terorganisir serta secara efektif mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih tugas antar anggota tim. Para aparaturnya dapat memahami dengan baik tanggung jawab masing-masing secara individu, sehingga upaya penegakan ketertiban umum dapat dilakukan dengan tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Selain itu, pola kerja Tim Kesatria yang tidak hanya berfokus pada tindakan penertiban secara langsung tetapi juga menerapkan pendekatan persuasif melalui berbagai imbauan kepada masyarakat, turut berkontribusi dalam menciptakan kondisi ketertiban umum yang lebih kondusif dan berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Tim Kesatria dalam Menjaga Ketertiban Umum

Hambatan utama yang paling signifikan dalam pelaksanaan Tim Kesatria berasal dari tingkat kesadaran sebagian masyarakat yang masih tergolong rendah terhadap urgensi menjaga ketertiban umum secara kolektif. Masih terdapat cukup banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mematuhi berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku, terutama dalam hal pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan berdagang atau parkir kendaraan, sehingga pelanggaran ketertiban umum cenderung terjadi secara berulang dan berkelanjutan.

Kendala Koordinasi Lintas Unsur

Salah satu kendala krusial dalam operasional Tim Kesatria adalah tantangan koordinasi lintas unsur atau berbagai pihak yang terlibat. Tim Kesatria pada dasarnya merupakan tim kolaboratif yang melibatkan beragam elemen seperti aparat kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja, perangkat kelurahan, serta unsur pendukung lainnya. Perbedaan yang mendasar mengenai tugas pokok dan fungsi, kewenangan operasional, serta jadwal kerja dari masing-masing unsur sering kali menyulitkan pelaksanaan kegiatan penertiban secara serentak dan terkoordinasi dengan baik. Kondisi tersebut secara langsung berdampak pada tingkat optimalisasi pelaksanaan kegiatan Tim Kesatria di lapangan, terutama pada saat dibutuhkan keterlibatan penuh dari seluruh unsur secara terpadu.

Kendala koordinasi lintas unsur ini juga memengaruhi proses evaluasi dan pengembangan kebijakan ke depan. Tidak adanya keseragaman dalam hal waktu pelaksanaan serta mekanisme kerja yang terstandarisasi antar berbagai unsur menyebabkan pelaksanaan penertiban belum dapat berjalan secara konsisten dan merata di seluruh wilayah yang mencakup Kecamatan Padang Utara.

Keterbatasan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat

Hambatan lainnya yang cukup substansial adalah keterbatasan pemahaman masyarakat luas terhadap esensi dan tujuan dari kebijakan Tim Kesatria. Meskipun berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan secara rutin, namun pada praktiknya masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya memahami baik tujuan strategis maupun mekanisme kerja dari Tim Kesatria sebagai sebuah inovasi kebijakan. Hal ini menyebabkan proses penertiban memerlukan waktu yang lebih lama karena para aparaturnya harus berulang kali memberikan penjelasan dan klarifikasi kepada masyarakat yang bersangkutan.

Selain dari kurangnya pemahaman yang memadai, rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap berbagai aturan ketertiban umum juga menjadi salah satu

hambatan yang sangat besar dan persisten. Sebagian masyarakat masih cenderung lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau ekonomi jangka pendek, terutama dalam aktivitas berdagang dan pemanfaatan ruang publik, sehingga pelanggaran ketertiban umum terus menerus terjadi secara berulang dan sulit diberantas secara tuntas.

KESIMPULAN

Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa inovasi kebijakan non-digital melalui pembentukan Tim Kesatria di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, memainkan peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kinerja penanganan ketertiban umum justru pada tingkat kecamatan. Keberadaan Tim Kesatria secara nyata telah mendorong terciptanya pola kerja yang jauh lebih terkoordinasi, responsif, dan efektif dalam menangani berbagai pelanggaran ketertiban umum, sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi jauh lebih baik dibandingkan dengan pola kerja konvensional yang digunakan sebelumnya.

Namun demikian, efektivitas dari inovasi kebijakan tersebut masih sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap aturan ketertiban umum yang berlaku. Rendahnya kesadaran pada sebagian masyarakat menunjukkan secara jelas bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kinerja dan dedikasi aparatur pelaksana semata, tetapi juga sangat membutuhkan dukungan sosial yang kuat serta partisipasi publik yang aktif dan berkelanjutan.

Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, Pemerintah Kecamatan Padang Utara sangat disarankan untuk terus memperkuat pelaksanaan inovasi kebijakan Tim Kesatria melalui peningkatan strategi sosialisasi yang lebih masif dan efektif serta penerapan pendekatan persuasif yang lebih humanis kepada seluruh lapisan masyarakat. Upaya-upaya ini sangat diperlukan guna meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap berbagai aturan ketertiban umum agar pelanggaran serupa tidak terus menerus terjadi secara berulang.

Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas instansi secara berkelanjutan dengan cara memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab dari setiap unsur yang terlibat dalam Tim Kesatria. Dukungan berupa penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara terus-menerus juga perlu menjadi perhatian utama agar kinerja tim dapat berjalan lebih optimal, konsisten, dan memberikan dampak yang berkelanjutan di seluruh wilayah Kecamatan Padang Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (2017). *Manajemen pelayanan publik: Peduli, inklusif, dan kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Muluk, K. M. R. (2018). *Inovasi administrasi publik*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id>
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan*

Masyarakat. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id>

Sawir, M., & Idris, I. (2024). Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Jayapura. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), pp. 45–58. Retrieved from <https://journal.universitas.ac.id>

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Wijayanti, L. (2012). *Inovasi kebijakan publik dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Surakarta*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (Tesis).